

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Pengadaan Mebel
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
II	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
8	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro

III	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
9	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
10	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
11	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
IV	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
12	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
	Pelayanan antar Kerja
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
	Perluasan Kesempatan Kerja
13	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
14	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
	Job Fair/Bursa Kerja
15	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
V	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
16	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
17	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
VI	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
18	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
VII	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
19	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
VIII	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
20	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri
	serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
BALAI LATIHAN KERJA	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Pengadaan Mebel
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
5	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota